

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pajak Daerah

3.1.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pada saat pertama sekali, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957. Dalam pelaksanaan terdahulu UU Drt tersebut masih banyak mempunyai kelemahan dalam berbagai hal maka dari itu disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Kemudian dalam perjalannya selama lebih kurang 3 tahun Undang-Undang ini diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Undang-Undang PDRD yang baru dan masih berlaku hingga sekarang.

3.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembayaran rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 yang dimaksud dengan pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

3.1.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local Government In Indonesia* (1989), kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penghasilan

Dari segi penghasilan mencukupi anak tujuan apa pajak tersebut dipungut, harus stabil dan dapat diprediksi, harus dapat mengantisipasi gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan menimbulkan harapan-harapan, serta biaya untuk memungut harus proposional dengan hasil yang diperoleh.

2. Keadilan

Dari segi keadilan, pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena pajak harus adil secara horizontal dalam arti bahwa beban pajak harus sama atas wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama, pajak harus adil secara vertikal dalam arti bahwa wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula dan secara geografis juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat.

3. Efisiensi

Dari segi efisiensi, pajak daerah tersebut harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Pajak tersebut dapat diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah

Dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pengumpulannya guna mencegah usaha-usaha penghindaran pajak dari wajib pajak, objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya, tidak boleh menyebabkan pengurusan sumber-sumber ekonomi daerah, tidak boleh dipaksakan untuk daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

Jenis – jenis Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b. Pajak Restoran;

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

c. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi tontonan film, pagelaran kesenian (musik, tari, dan/ atau busana), kontes kecantikan (binaraga dan sejenisnya), pameran, diskotik (karaoke, club malam, dan sejenisnya), sirkus (akrobat dan sulap), permainan bilyard, golf, boling, pacuan (pacuan kuda, kendaraan

bermotor, dan permainan ketangkasan), panti pijat (refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran), dan pertandingan olahraga.

d. Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat, stiker, selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, apung, suara, film/slider, dan reklame peragaan.

e. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri (seluruh pembangkit listrik) maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu

colloccia fuchliap haga, colloccia maxina, colloccia esculanta, dan colloccia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai.

3.2 Pajak Parkir

3.2.1 Dasar Hukum Pajak Parkir

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

3.2.2 Pengertian Pajak Parkir

Definisi dari Pajak Parkir ada berbagai macam dan para ahli atau pemerhati pajak yang menyajikan definisi tersebut sesuai dengan kemampuan pemahaman dan penukaran mereka. Berikut definisi-

definisi Pajak Parkir oleh para ahli yang dapat penulis cantumkan antara lain adalah:

1. Menurut Liberti Pandiangan (2007;49) pengertian pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor, yang memungut bayaran.
2. Menurut Marihot P. Siahaan (2005;407), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal 1 mendefinisikan Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak Parkir adalah “pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

3.2.3 Objek dan Subjek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal 3 ayat (1) mendefinisikan Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan (2007;49) Objek Parkir adalah setiap penyelenggaraan parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Jadi menurut Undang-Undang dan definisi diatas Objek Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan parkir di luar jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

Dalam penyelenggaraan parkir perusahaan pasti memiliki fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan parkir tersebut. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gedung Parkir
2. Peralatan Parkir
3. Garasi yang disewakan
4. Tempat penitipan kendaraan

Jenis-jenis kendaraan yang diparkir:

1. Kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/container
2. Kendaraan bermotor bus dan truk
3. Kendaraan bermotor roda 4
4. Kendaraan bermotor roda 3

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir di kenakan pajak. Ada pengecualian yang tidak termasuk objek pajak parkir yaitu:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

2. Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan fasilitas parkir di luar lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah”.

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan Subjek Pajak Parkir adalah “orang pribadi atas badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir”.

Berdasarkan uraian undang-undang dan definisi Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan/menyelenggarakan parkir dan memungut pembayaran di luar lahan milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

3.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pajak Parkir menurut (Marihot P. Siahaan, 2005;407) dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang harus dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada pajak parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat

ditetapkan dengan peraturan daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir.

Perhitungan pengenaan pajak parkir besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan (Wibowo,2009;54). Sementara itu dasar pengenaan pajak (DPP) adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku.

3.2.5 Tarif Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tarif Pajak Parkir pada dasarnya yang diberlakukan di masing-masing daerah hampir sama. Pajak Parkir yang ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota dan kabupaten diberi kewenangan untuk mendapatkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Kota Semarang menetapkan tarif pajak sebesar 25%

berdasarkan perda Kota Semarang. Sesuai dengan pasal 6 pada peraturan daerah Kota Semarang tahun 2011 ditetapkan pajak parkir di Kota Semarang sebesar 25%.

Sedangkan menurut perubahan atas peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, besaran tarif umum pajak parkir Kota Semarang ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
2. Kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
3. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
5. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

3.3 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung (Kaho, 1997:153). Pemasukan retribusi parkir di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB).

Dalam lingkungan perkotaan biasanya pengenaan parkir waktunya dibatasi, misalnya 2 jam pertama dengan tarif dasar dan jam-jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan dengan daerah yang bersangkutan.

Pada daerah perkotaan penyediaan lahan parkir tidak menjadi monopoli pemerintah daerah, tetapi swasta pun dimungkinkan untuk menyediakan jasa pelayanan ini karena frekuensi penggantian cepat sekali yang akhirnya merupakan bentuk usaha yang membawakan hasil yang buruk.

Tabel 3.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi Parkir

| | Pajak | Retribusi |
|-------------------------|---|--|
| Dasar Hukum | Undang-Undang dan Peraturan Daerah | Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Pejabat Negara yang lebih rendah |
| Balas Jasa | Tidak langsung | Langsung dan nyata kepada individu |
| Objek | Umum | Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah |
| Sifat | Dapat dipaksakan, Wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi | Dampak dipaksakan, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah |
| Lembaga Pemungut | Pemerintah Pusat maupun Daerah | Pemerintah Daerah |
| Tujuan | Kesejahteraan untuk Umum | Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah |

Sumber: Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

3.4 Potensi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang

Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih sampel pajak dan retribusi parkir selama satu hari (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 7 hari untuk masing-masing sampel. Sehingga ditemukan potensi pendapatan selama 1 minggu. Untuk menghitung DPP penulis melakukan observasi langsung ke objek penelitian untuk menghitung DPP penulis

menghitung rata-rata total kendaraan untuk hari kerja dan hari libur dan mengalikan dengan tarif parkir masing-masing tempat. Untuk di Area Paragon City Mall Semarang terdapat 2 lahan parkir yaitu di samping dan di dalam atau berada di Paragon. Untuk retribusi parkir terdapat di samping Paragon Mall dengan kapasitas masing-masing 2000 marka parkir di Paragon Mall. DPP dihitung dari jumlah rata-rata total kendaraan sepeda motor yang telah dikali dengan tarif parkir kemudian di jumlah dengan rata-rata kendaraan mobil dikali dengan tarif parkir.

3.5 Hasil Penelitian Lapangan

3.5.1 Deskripsi Data Lapangan

Lokasi penelitian data parkir adalah Area Paragon City Mall Semarang, untuk retribusi pengambilan data atau menggunakan Data Primer melalui interview dilakukan kepada beberapa parkir dilokasi tersebut. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut;

1. Luas lahan parkir
2. Kapasitas lahan
3. Pergantian/rotasi
4. Tarif parkir per jam

3.5.2 Analisis dan Pembahasan Data

Melalui jumlah kendaraan yang ada di perkotaan, potensi dapat dihitung dari jumlah kendaraan, dikalikan perkiraan rata-rata parkir dan dikalikan dengan tarif yang berlaku:

| Rumus Pajak Parkir | Rumus Retribusi Parkir |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pajak Parkir = Tarif Parkir x DPP | PPkb = KBm x To x Pr |

Penjelasan :

PPkb = Potensi parkir dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor

KBm = Jumlah kendaraan bermotor yang parkir

To = Masa pergantian rata-rata (Turn Over)

Pr = Tarif menurut perda (Untuk Sepeda Motor Rp 2.000,- ; Mobil Rp 3.000,-)

3.5.3 Perhitungan Potensi Retribusi dan Pajak Parkir

1. Perhitungan Potensi Retribusi Parkir

- Kapasitas Lahan Parkir : 2000 marka parkir di Paragon Mall
 Kapasitas Sepeda Motor : 1500 marka parkir
 Kapasitas Mobil : 500 marka parkir
- Tarif Parkir
 Marka 2000/ jam selanjutnya + 1000/jam
 Marka 3000/ jam selanjutnya + 1000/jam

Tabel 3.2

Frekuensi TurnOver (Pergantian Parkir Sepeda Motor dan Mobil)

| Jenis Kendaraan | Weekdays | Weekend |
|-----------------|----------|---------|
| Sepeda Motor | 2/jam | 3/jam |
| Mobil | 3/jam | 4/jam |

Sumber: Paragon Mall

Tabel 3.3

Frekuensi Jumlah Kendaraan Parkir Sepeda Motor dan Mobil

| Jenis Kendaraan | Weekdays | Weekend |
|-----------------|----------|---------|
| Sepeda Motor | 1.125 | 1.275 |
| Mobil | 325 | 400 |

Sumber: Paragon Mall

Jam Buka : 10.00 – 22.00

Rumus : $PPkb = Kbm \times To \times Pr$

- Weekdays

Sepeda Motor $(1.125 \times (12/2) \times \text{Rp } 3.000,00 = \text{Rp } 20.250.000,00/\text{hari}$

Mobil $(325 \times (12/3) \times \text{Rp } 5.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.500.000,00/\text{hari}}$

$= \text{Rp } 26.750.000,00/\text{hari}$

Potensi pajak sebulan

$(\text{Rp } 26.750.000,00 \times 20 \text{ hari weekdays}) = \text{Rp } 535.000.000,00/\text{bulan}$

- Weekend

Sepeda Motor (1.275 x (12/3) x Rp 4.000,00 = Rp 20.400.000,00/hari

Mobil (400 x (12/4) x Rp 6.000,00 = Rp 7.200.000,00/hari
= Rp 27.600.000,00/hari

Potensi pajak sebulan

(Rp 27.600.000,00 x 8 hari weekend) = Rp 220.800.000,00/bulan

Total atas Potensi Pajak perbulan

Rp 535.000.000,00 + Rp 220.800.000,00 = Rp 755.800.000,00/bulan

Pajak Terutang

Pajak yang Disetor ke Kas Daerah Kota Semarang sebesar

30% x Rp 755.800.000,00/bulan = Rp 226.740.000,00/bulan

2. Perhitungan Potensi Pajak Parkir

Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih sampel pajak parkir selama satu hari DPP dihitung dari jumlah rata-rata total kendaraan sepeda motor yang telah dikali dengan tarif parkir kemudian di jumlah dengan rata-rata kendaraan mobil dikali dengan tarif parkir. Besarnya pokok Pajak Parkir dapat dihitung dengan menggunakan formula:

| |
|---|
| $DPP = \text{Rata-Rata Total Kendaraan} \times \text{Tarif Parkir}$ |
|---|

Keterangan:

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

Rata-Rata Total Kendaraan = Total Kendaraan Berdasarkan Jumlah
Kendaraan saat Weekdays +
Weekend

Tarif Parkir = Berdasarkan Perda Tarif Pajak
sebesar 25%

Perhitungan besarnya Dasar Pengenaan Pajak, Rata-Rata Total Kendaraan dikalikan Tarif Parkir. Berikut perhitungan Potensi Pajak Parkir:

Tabel 3.4
Frekuensi Rata-Rata Menurut Jenis Kendaraan

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan Hari Kerja (Weekdays) | Jumlah Kendaraan Hari Libur (Weekend) | Rata-Rata Total Kendaraan | Tarif Parkir | DPP |
|----|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Sepeda Motor | 1000 | 1100 | 2200 | 2000 | 4.400.000 |
| 2. | Mobil | 300 | 400 | 700 | 3000 | 2.100.000 |

Sumber: Hasil Olahan Survey, Mei 2017

DPP untuk pajak parkir di Area Paragon City Mall Semarang DDPnya sebesar Rp 4.400.000 untuk kendaraan sepeda motor 2200 yang dikenakan tarif Rp 2.000 dan DPP untuk mobil sebesar Rp 2.100.000 dengan jumlah rata-rata total kendaraan mobil 700 dikenakan tarif Rp 3.000,-

Tabel 3.5
Total DPP untuk Pajak Parkir

| No | Jenis Kendaraan | DPP | Total DPP 1 Minggu | Total DPP 1 Bulan |
|----|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 1. | Sepeda Motor | 4.400.000 | 30.800.000 | 132.000.000 |
| 2. | Mobil | 2.100.000 | 14.700.000 | 63.000.000 |

Sumber: Tabel 3.4 data diolah

Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih sampel pajak parkir satu hari (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 7 hari. Potensi Pajak Parkir di Area Paragon City Mall Semarang memiliki potensi pendapatan pajak parkir sepeda

motor sebesar Rp 30.800.000 untuk tiap minggunya dan Rp 132.000.000 untuk setiap bulannya. Sedangkan potensi pendapatan pajak parkir mobil sebesar Rp 14.700.000 untuk tiap minggunya dan Rp 63.000.000 untuk setiap bulannya.

Tabel 3.6
Potensi Pajak Parkir dalam 1 Bulan

| No | Jenis Kendaraan | Total DPP 1 Bulan | Potensi Pajak Parkir (25%) |
|----|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Sepeda Motor | 132.000.000 | 33.000.000 |
| 2. | Mobil | 63.000.000 | 15.750.000 |

Sumber: Tabel 3.5 data diolah

Potensi penerimaan pajak parkir dapat dihitung dengan cara mengalikan potensi pajak parkir selama satu bulan dengan tarif pajak parkir sebesar 25%. Sehingga potensi penerimaan pajak tiap bulan di Area Paragon City Mall Semarang sebesar Rp $132.000.000 \times \frac{25}{100} = \text{Rp } 33.000.000$ setiap bulannya untuk sepeda motor, sedangkan untuk mobil potensi Pajak Parkir sebesar Rp $63.000.000 \times \frac{25}{100} = \text{Rp } 15.750.000$ setiap bulannya.

Dari perhitungan berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dalam 1 tahun berjalan total dari Potensi atas perhitungan Pajak Parkir di Area Paragon City Mall Semarang Rp 396.000.000 + Rp 189.000.000 = Rp 585.000.000,- untuk pajak terutang atas pajak parkir selama 1 tahun dengan jenis kendaraan Sepeda Motor dan Mobil di Area Paragon City Mall Semarang.

Rp 396.000.000 di dapat dari Potensi Jenis Kendaraan Sepeda Motor $\text{Rp } 132.000.000 \times 12 \times \frac{25}{100} = \text{Rp } 396.000.000$, untuk Rp 189.000.000 di dapat dari Potensi Jenis Kendaraan Mobil $\text{Rp } 73.500.000 \times 12 \times \frac{25}{100} = \text{Rp } 189.000.000$. Jadi, total keseluruhan

Pajak Parkir di Area Paragon City Mall Semarang memiliki potensi yang cukup besar yaitu Rp 585.000.000.

3.6 Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang

Pengertian efektivitas menurut Richard M Steers (2005:166) adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak di capai. Sedangkan menurut Prakoso (2005:142) efektivitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak/retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Menurut Umar (1998:9) menyatakan “efektivitasnya mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ ke-n}{Target\ Penerimaan\ Tahun\ ke-n} \times 100\ %$$

Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.7
Klasifikasi Kriteria Presentase Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------|
|------------|----------|

| | |
|----------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 91%-100% | Efektif |
| 81%-90% | Cukup Efektif |
| 61%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Perhitungan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang dapat dilihat dalam tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir
Paragon City Mall Semarang

| Tahun | Pajak Parkir | | Retribusi Parkir | |
|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2012 | 150.000.000 | 165.650.000 | 400.000.000 | 450.445.000 |
| 2013 | 200.000.000 | 224.485.000 | 450.500.000 | 487.225.000 |
| 2014 | 250.000.000 | 285.658.000 | 480.000.000 | 513.765.000 |
| 2015 | 300.000.000 | 388.476.000 | 550.000.000 | 484.745.000 |
| 2016 | 500.000.000 | 407.823.000 | 600.000.000 | 622.680.000 |

Sumber: BAPENDA Kota Semarang 2017

Dari tabel di atas dapat diukur Efektivitas penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang dapat dihitung dengan cara:

Efektivitas Pajak Parkir

a. Tahun Anggaran 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 165.650.000}{\text{Rp } 150.000.000} \times 100\% = 110\%$$

b. Tahun Anggaran 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 224.485.000}{\text{Rp } 200.000.000} \times 100\% = 112\%$$

c. Tahun Anggaran 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 285.658.000}{\text{Rp } 250.000.000} \times 100\% = 114\%$$

d. Tahun Anggaran 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 388.476.000}{\text{Rp } 300.000.000} \times 100\% = 129\%$$

e. Tahun Anggaran 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 407.823.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times 100\% = 81\%$$

Efektivitas Retribusi Parkir

a. Tahun Anggaran 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 450.445.000}{\text{Rp } 400.000.000} \times 100\% = 112\%$$

b. Tahun Anggaran 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 487.225.000}{\text{Rp } 450.500.000} \times 100\% = 108\%$$

c. Tahun Anggaran 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 513.765.000}{\text{Rp } 480.000.000} \times 100\% = 107\%$$

d. Tahun Anggaran 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 484.745.000}{\text{Rp } 550.000.000} \times 100\% = 88\%$$

e. Tahun Anggaran 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 622.680.000}{\text{Rp } 600.000.000} \times 100\% = 103\%$$

Dari hasil tabel dan pengelolaan data di atas per tahun 2012 sampai tahun 2016 untuk realisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang masih terdapat penurunan realisasi yang tidak wajar. Penurunan tersebut terjadi karena adanya objek retribusi parkir yang dijadikan tempat parkir bebas dan tidak dipungut pajak atas tempat tersebut, kurangnya pendataan dan belum ada pengawasan sebelumnya, hal tersebut tahun 2015 penurunan realisasi retribusi parkirnya sebesar 29.020.000, dan untuk retribusi parkir kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2016 kenaikan atas realisasi retribusi parkirnya Rp 137.935.000. Untuk realisasi pajak parkir per tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan tingkat kenaikan atas realisasi pajak parkirnya sebesar Rp 102.818.000. Pada tahun 2016 tidak sesuai atau dapat dikatakan realisasi sangat kurang dari target sekitar Rp 107.823.000, hal ini dikarenakan adanya lahan parkir baru di area tersebut.

Tingkat efektivitas yang mencapai 100% dikarenakan realisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan apabila realisasi penerimaan pajak parkir masih dibawah target yang telah ditetapkan sehingga tingkat keefektivitasannya sebesar 80% yang artinya kurang efektif. Hal itu disebabkan karena pada tahun tersebut adanya peralihan manajemen yang terjadi sehingga penetapan target untuk pajak dan retribusi parkir tidak sesuai dengan tahun sebelumnya dan juga banyaknya objek pajak yang belum didata dan diawasi sehingga tidak memberikan pemasukan untuk pajak parkir.

Sesuai dengan tingkat keefektivitasnya yang mencapai 80% dan 100% dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam segi penerimaan pajak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada akhir-akhir ini atau dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pembangunan yang sudah pesat dewasa ini seperti meningkatnya pusat pembelanjaan, pertokoan dan hiburan serta meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dapat membuat penerimaan pajak dan retribusi parkir lebih tinggi dan dapat memberikan pemasukan yang lebih besar.

3.6.1 Permasalahan yang Menyebabkan Potensi Retribusi dan Pajak Parkir yang Masuk ke Kas Daerah Jadi Menurun

Dari data di atas merupakan perhitungan atas adanya penurunan di tahun 2015 dari data *tabel 3.8 "Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang"* disitu terdapat penurunan dari yang seharusnya potensinya sebesar apa yang sudah diperhitungkan sebesar Rp 682.500.000 menjadi tercatat realisasinya sebesar Rp 404.823.000, terdapat penurunan Rp 277.677.000 disebutkan bahwa di tahun tersebut terdapat permasalahan yaitu adanya tempat parkir baru yang sudah dapat digunakan namun belum dikenakan pajak atas penggunaannya atau masih dalam pembangunan dan, selain itu terdapat Pajak Parkir yang seharusnya dibayarkan namun Pajak Parkir tersebut tidak dibayarkan

oleh subjek pajak tepat waktu atau terjadi keterlambatan, dengan hal tersebut maka di tahun 2016 target menjadi tidak sesuai atau sangat kurang dari target yang ditetapkan. Yang seharusnya target tersebut dapat mengemban atas realisasi yang perhitungan sebesar Rp 682.500.000, malah tercatat sebesar Rp 404.823.000. Sangat disayangkan akan terjadinya hal ini yang menyebabkan turunnya efektivitas juga pada tahun 2016.

Gambar 3.1
Pembuatan Lahan Baru



Sumber: SkycraperCity, Gedung Ex Wika dijadikan tempat parkir motor

Untuk permasalahan pada retribusi parkir terjadi saat terjadi saat lahan yang digunakan parkir semestinya namun digunakan untuk keperluan event acara untuk konser. Pada saat itu parkir dialihkan ke tempat yang tidak semestinya dan terdapat penurunan biaya yang tidak sewajarnya untuk pembayaran parkir di area Paragon City Mall Semarang. Terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan lahan yang tidak semestinya digunakan namun tetap digunakan untuk pemenuhan kepentingan oknum tersebut.